RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2017 - 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 - 2022 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tanggal 20 November 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017 – 2022. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2017 -2022. Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan mampu menjawab tuntutan pembangunan bidang Lingkungan Hidup baik skala lokal, regional, nasional, maupun global dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang disusun untuk dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan di bidang lingkungan hidup, baik oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur serta para pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur. Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari pelayanan pencegahan pencemaran air; pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak

bergerak; pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa; dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah :

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal Pelayanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
- 21) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD;

- 24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 0070);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2005-2025;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2022;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;
- 31) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 32) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur.

Mengacu pada maksud di atas, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- Menjabarkan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih untuk dilaksanakan dalam program dan kegiatan Tahun 2018-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.
- 2) Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.
- 3) Sebagai acuan bagi penentuan skala prioritas program / kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan daerah.
- 4) Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien. Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Flores Timur

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Penyelenggaraan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi pokok Dinas Lingkungan Hidup ini diselenggarakan oleh:

- Sekretariat
- Bidang Tata Lingkungan
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Hidup
- UPTD Laboratorium Lingkungan

3. Jumlah Personil.

Jumlah PNS pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 33 orang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Latar belakang pendidikan sebagai berikut: : SLTP (2 orang), SLTA / SMK (15 orang), Diploma III (- orang), S1 (15 orang) dan S2 (1 orang).

Berdasarkan golongan: Golongan IV (4 orang), Golongan III (19 Orang), Golongan II (7 orang), Golongan I (1 orang).

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusn perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan. Dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
- b. Penyusunan program dan anggaran.
- Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran.
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian.
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor.
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan:

Tugas Sub Bagian Keuangan:

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran.
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian.
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor.
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan:

Tugas Sub Bagian Keuangan:

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas.

Fungsi Sub Bagian Keuangan:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- c. Penatausahaan keuangan.
- d. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi:

Tugas Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi:

Pelaksanaan urusan proram, data dan evaluasi dinas.

Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi:

- a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi.
- b. Perencanaan program, data dan evaluasi.
- c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG TATA LINGKUNGAN:

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Tata Lingkungan dan menyelengarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Tata Lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis Tata Lingkungan.

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Tata Lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Tata Lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan urusan Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Pelaksanaan program dan kegiatan Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan urusan kajian dampak lingkungan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kajian dampak lingkungan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kajian dampak lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan kajian dampak lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kajian dampak lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan urusan pemeliharaan lingkungan hidup.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN:

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah:

Bertugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menyelengarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Sampah.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

Fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Sampah.

- b. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sampah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP:

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah:

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan menyelengarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan Lingkungan.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemantauan lingkungan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pemantauan Lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis Pemantauan Lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pemantauan Lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pemantauan Lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pencemaran Lingkungan.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pencemaran lingkungan

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pencemaran lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis pencemaran lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pencemaran lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pencemaran lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerusakan Lingkungan.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan kerusakan lingkungan Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kerusakan lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis kerusakan lingkungan.

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan kerusakan lingkungan.
- d. Pengendalian , evaluasi dan pelaporan kerusakan lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Bertugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan menyelengarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
- b. Perumusan kebijakan teknis Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja penyelesaian sengketa lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelesaian sengketa lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan penegakan hukum lingkungan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja penegakan hukum lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan penegakan hukum lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penegakan hukum lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- b. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- Pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN:

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan:

Membantu Kepala Dinas dalam urusan pengelolaan Laboratorium untuk mendukung kegiatan Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup.

Uraian Tugas:

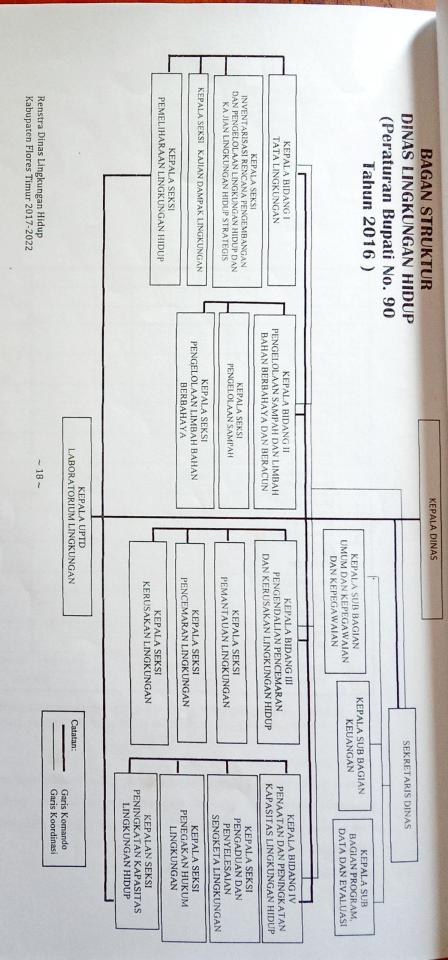
- 1. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Laboratorium berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.
- 2. Melaksanakan operasional pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup sesuai lingkup tugas.
- 3. Melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan.
- 4. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas kepada tenaga teknis UPTD Laboratorium lingkungan.
- 5. Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan kearsipan UPTD Laboratorium lingkungan.

- 6. Melaksanakan pelayanan Laboratorium lingkungan kepada masyarakat.
- 7. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan bidang terkait.
- 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
- 10. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi.

4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Bidang Tata Lingkungan;
 - Seksi Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Seksi Pengelolaan Sampah.
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Seksi Pemantauan Lingkungan.
 - Seksi Pencemaran Lingkungan.
 - Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - Seksi Pengaduaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. UPTD Laboratorium Lingkungan.



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya manusia. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta jenis kelamin dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jenis Kelamin

NO. PANGKAT /			TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH	
	GOLONGAN	SZ	S1	D3	SLTA	SLTP	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1		-	-	-	1	
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	-	1		-	-	1	un Aka
3.	Pembina (IV/a)	-	3	-	-	-	3	-
4.	Penata Tk.I (III/d)	-	7	-	-	-	1	-
5.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	2	-	1		3	-
6.	Penata (III/c)	-	1	-	1	-	1	1
7.	Penata Muda Tk. I (III/b)		3		1	-	1	3
8.	Penata Muda (III/a)		1				-	1
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	3	-	3	10
10.	Pengatur (II/c)	-	-	-	1	-		1
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-		3	-	1	2
12.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	1	1	
13.	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-	-	1	1	
14.	Juru (I/c)	-	-	-		-		
	JUMLAH	1	15	-	15	2	22	11

2. Asset

Adapun asset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

				KONDISI	
NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	7/1/2. 25/2	
2	Gedung Laboratorium	1 Unit	1 Unit		-
3	Gedung Pengolah Sampah	1 Unit	1 Unit		-
4	Garasi Mobil	1 Unit	1 Unit		-
5	Kendaraan Roda Enam	3 Unit	2 Unit		1 Unit
6	Kendaraan Roda Empat	2 Unit	1 Unit		1 Unit
7	Kendaraan Roda Dua	5 Unit	5 Unit		
8	Kendaran Roda Tiga(Gerobak Sampah)	13 Unit	10 Unit		3 Unit
9	. Peralatan Laboratorium	1 Paket	1 Paket	-	
10	Meja Biro	11 Buah	11 Buah		1 Buah
m10755 (-	Meja 1/2 Biro	35 Buah	31 Buah	3 Buah	1 Buah
11	Meja Komputer	3 Buah	1 Buah	2 Buah	-
12		6 Buah	3 Buah	1 Buah	2 Buah
13	Komputer	9 Buah	6 Buah	2 Buah	1 Buah
14	Laptop	11 Buah	8 Buah	2 Buah	1 Buah
15	Printer	4 Buah	0 Buah		4 Buah
16	UPS	4 Buah	4 Buah		**************************************
17	Mesin Hitung	3 Buah	3 Buah		•
18	Kipas Angin	7 Unit	7 Unit		- 100 · 100
19	AC Panasonic	1 Buah	1 Buah	•	•
20	Pesawat Telepon	1 Unit	1 Unit	•	•
21	Tabung Kebakaran	1 Buah	1 Buah	•	-
22	White Board	1 Set	1 Set	-	2 Buah
23	Kursi Tamu (Sofa)	58 Buah	50 Buah	6 Buah	2 Buan
24	Kursi Kerja	13 Buah	12 Buah	1 Buah	-
25	Kursi Rapat (Biasa)	1 Buah	1 Buah	•	
26	Meja Timbang	1 Buah	1 Buah	•	1 Buah
27	Lemari Kaca	12 Buah	9 Buah	2 Buah	1 Buair
28	Lemari Arsip	2 Buah	2 Buah	•	
29	Filling Kabinet	1 Buah	1 Buah	•	
30	Kulkas	2 Buah	2 Buah	-	
31	Dispenser	2 Buah	2 Buah	2 Buah	
32	Galon Air	4 Buah	2 Buah	2.000	
33	Jam Dinding				

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam kurun waktu 2012 – 2016, penanganan permasalahan dalam bidang lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur masih dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup serta pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Permasalahan di atas semakin menjadi fokus perhatian sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya upaya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan Lingkungan Hidup, baik pada tingkat Provinsi, Regional maupun tingkat Pusat;
- b. Terlaksananya kegiatan penilaian, pengarahan dan pembinaan AMDAL,
 UKL/UPL dan SPPL mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- c. Penyediaan data lingkungan, Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- d. Penyediaan data kualitas air melalui penyusunan Laporan Kualitas Air Tahunan;
- e. Melakukan inventarisasi sumber-sumber air potensial terhadap ancaman kerusakan;
- f. Melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan peran serta masyarakat dalam Gerakan Penghijauan Berbasis Masyarakat (GPBM);
- g. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, aparatur, masyarakat dan pengelola lingkungan hidup dengan berbagai pelatihan pengelolaan LH;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dengan pemberian penghargaan dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti halnya Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru;
- Terselenggaranya kegiatan seleksi untuk penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi dan Nasional;
- j. Terselenggaranya pengelolaan taman, persampahan dan kebersihan.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

U	4	ω	2	-	1		6.2.N
Luas Kawasan Lindung	Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Unit Pengolahan Sampah yang Berfungsi dengan baik	Jumlah TPS	Jumlah TPA		Fungsi SKPD	Indikator Kinerja sesual Tugas dan
					8		Target T
					4		Target
318,2 km²	A Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Unit	56 TPS	3 TPA	5	SKED	Target Indikator
63,5 km²	Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Unit		1 TPA	9	2012	
63,5 km²	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup		4 TPs		7 70	2013	Target R
63,5 km²	Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup		4 TPs	1 TPA	8	2014	t Renstra SKPD (Tabun k
63,5 km²	Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup		4 TPs		9	2015	bun'ke-
63,5 km²	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	,	4 TPs	1 TPA	10	2016	
	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup		10 TPS	1 TPA	II	2012	
0,01 km²	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup				77	2013	Reall
0,3 km²	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	,	,		13	2014	asi Capalan Ta
0,0 km²	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup				14	2015	hun ke
0.0 km²	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup		54 TPS	1 TPA	15	2016	
	100 %			100%	16	2010	
	100%		·		17	2013	RasloCa
	100%				10.	2014	alan pad
	100%	,	100%		19	2015	or annual contracts
	100%		96,43	50%	20	2016	

7.	6
Persentase usaha yang memenuhi standar baku mutu	Terbuka Hijau
90%	1.671,5 km²
0%	334,3 km²
70%	334,3 km²
75%	334,3 km²
80%	334,3 km²
85%	334,3 km²
24,5%	
24,5%	
46,00%	
41,50%	
70%	
24,5%	
65%	
64%	
87%	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur,

Drs. PETRUS PEDO MARAN,M.Si Pembira Utama Muda NIP. 1972/030 199311 1 001

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

Belanja Langsung 1.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3. Prongam Peningkatan Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan	2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Uralan (**)
1.862.656,500	38.068.000	8,691,000	7,704,420	357.291.000		2012	
1.222 048,000	75.000.000	25.000,000	7,520,000	528.000.000		2019	An An
1.756 480 000	82.500.000	36.350.000	75,000,000	465.665.000	A CALLED	7014	Anggaran pada Jahuri Ke
1.793.600.000	90.750.000	37.337.500	85.000.000	504,316.000	State of the state	2014 2015	
1.892,450,000	99.825.000	38.457.625	550.000.000	522.975,000		2016	
2.050.306.000	19.219.000	8.675.000	87.213.494	495.504.315	The Section	2002	
1.545.524.636	16.624.000	23,740.000	69.617.500	565.494.402		2013	Realisat
2017916600	62.861.500	25.008.100	262.211.500	776.894.271	9	2013	Aligaran pada Tahiin ke
222.199.000	79,772.000	29 227 500	601,578.457	2.855.884.655	0	2015	ahii ko
369.989.048	67.713.626	36.027.900	317.071.425	3,048.187.891	J. F. S.	2016	
101.59	50.48	99,81	113.19	138,7	502	2012	A) Resident
126.47	22 16	94.96	92.57	107.10	13	2013	ntara Realis
114.88	76.19	68.79	349.61	166.83	N.	2014	ad dan Ang
123,71	87.90	78.27	70.77	56628	- 35	7016	0
195.50	67.83	93.68	57.64	582.85	916	2016	
2,504	(37)	149	(81)	(2)		Angena	
2,336	(27)	149	(80)	Ō			3) (1) 5) (1) 5) (3)

7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	6.Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut	peningkatan kualitas akses informasi Sumber Daya dan Lingkungan	4.Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		18.080.000		155.314.500	129 363 500
150.572.000	63.000.000			563.000.000	123.320.000
160.400.000	67.000.000	•		58.800.000	172.378.000
171.717.000	71.000.000			20.020.000	261.775.000
				641.000.000	247.309.000
•		17.552.000	,	167.450.500	114 580.300
				176.360.840	82.686.300
	187.720.500			496.195.000	242 189 115
		•		16.753.000	310.924 684
				•	399,375,032
		97.07		107.81	88.57
			e year	313.23	67.05
•				843,86	140.49
2013/201				83.68	118.77
•			Mary	TO THE	161,48
		1,13		937	(42)
			,	591	(35)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

- A. Permasalahan dan Tantangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

 Beberapa permasalahan dan tantangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

 antara lain:
 - Minimnya anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Flores Timur.
 - 2. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang lingkungan.
 - 3. Minimnya kepedulian pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan lingkungan.
 - 4. Kebijakan pada sektor lain yang kurang berwawasan lingkungan.
 - 5. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan dan kebersihan.
 - 6. Belum maksimalnya pelayanan laboratorium pengujian kualitas air.

B. Kondisi Yang Diinginkan Kedepan

Untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup diharapkan lebih responsive dan partisipatif serta selalu menjadi motivator dan dinamisator, agar mampu menjawab berbagai tantangan guna mewujudkan pelayanan bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang efektif dan optimal. Untuk itu beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain:

- 1. Peningkatan anggaran dan sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup.
- 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang lingkungan.
- Peningkatan kesadaran dan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
- 4. Meningkatnya koordinasi lintas sektor demi terwujudnya kesepahaman dalam berbagai upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 5. Memaksimalkan pengelolaan persampahan dan kebersihan.
- 6. Memaksimalkan pelayanan laboratorium pengujian kualitas air.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam memberikan pelayanan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan terdapat beberapa faktor penghambat dan juga faktor pendorong terhadap pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

			Faktonyang M	S. Faktoryang Mempengaruhi		
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat int	Digunakan	loternal (Kewenangan Skpd)	Eksternal (Diluar Kewenangan) Skpd)	Permasalahan Pelayanan SKPD	
The Republic	1-2	he 12-3	40004000	-5 Billion	6-6	
Peningkatan jumlah kebijakan lokal (perda, dll) di bidang lingkungan hidup dan kebersihan	Baru memiliki 2 perda : -Perda tentang retribusi pelayanan sampah - Perda Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan	Minimnya perda/aturan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dibutuhkan Perda RPPLH	Terbatasnya SDM dan dana	Minimnya anggaran	Belum maksimalnya pelayanan di bidang lingkungan hidup	
Peningkatan partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan	Tingkat partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan masih sangat rendah	Pola tebas bakar dalam membuka lahan baru, penebangan liar, pembuangan limbah hasil produksi usaha yang masih sembarangan , eksploitasi SDA di darat dan laut	- Kurangnya sosialisasi kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha - Kurangnya koordinasi dengan semua stake holder	Rendahnya pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan	Belum terlaksananya sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemulihan dan perlindungan lingkungan karena keterbatasan dana, SDM.	
Peningkatan pemantauan pelaksanaan pemulihan lingkungan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan	Minimnya Intensitas pemantauan terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan	Peningkatan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan	Minimnya anggaran untuk kegiatan pemulihan Iingkungan, kuantitas SDM dan intensitas kerja	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan terkait dengan kerusakan lingkungan	Belum maksimalnya pemantuan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat kerusakan lingkungan	

Perumusan Kebijakan Jokal dan pengembangan pedoman tentang AMDAL/ UKL/ UPL/ SPPL	Belum ada Kebijakan lokal tentang AMDAL/ UKL/ UPL/ SPPL belum ada	Klasifikasi usaha/kegiat an yang wajib AMDAL, UKL/UPL dan SPPL	Belum dilakukan penyusunan kebijakan lokal tentang AMDAL/UKL/ UPL/SPPL	Belum adanya kebijakan dari instansi teknis yang mendukung pengklasifikasian usaha/kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL	Pengklasifikasian usaha/kegiatan masih berpedoman pada peraturan pusat
Peningkatan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian kerusakan hutan dan lahan	belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait perihal pengawasan dan pengendalian hutan/lahan	penebangan pohon dan kebakaran hutan / lahan yang masih sering terjadi	Belum adanya konsep perencanaan yang jelas tentang upaya pengawasan, pengendalian kerusakan hutan dan lahan;	dan SPPL Minimnya data yang diperoleh dari instansi terkait	belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait perihal pengawasan dan pengendalian hutan/lahan
Peningkatan akses Informasi Lingkungan Hidup bagi masyarakat	Sistem Informasi Lingkungan belum terlaksana secara baik dan efektif	Informasi mengenai lingkungan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat	Belum adanya konsep perencanaan yang jelas tentang pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Minimnya data yang diperoleh dari instansi terkalt	Belum optimalnya penyelenggaran sistem informasi lingkungan
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan / kebersihan	Kurangnya Jumlah sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan	Frekuensi pengangkuta n sampah dan kuantitas timbulan sampah yang terangkut	- Minimnya anggaran pelayanan persampahan / kebersihan	Minimnya pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan / kebersihan	Belum maksimalnya pengelolaan persampahan / kebersihan

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (lingkungan Eksternal)

W.	IsuStrategis						
No	Dinamika was	Dinamika Nasional	es e Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain			
12	是4年前日生2年前周期	300000000000000000000000000000000000000		#### S			
1	Isu Pemanasan Global (Global Warming) dan Perubahan Iklim (Climate Change)	Program Kerja Nasional dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup tentang berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pemanasan global dan perubahan iklim	Perencanaan Program/Kegiatan skala regioanl/lokal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pemanasan global dan perubahan iklim				
2	Penipisan Lapisan Ozon	Regulasi dan Kebljakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan upaya-upaya perlindungan terhadap lapisan ozon	Terjalinnya koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten demi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan perlindungan terhadap lapisan ozon				
3	Degradasi hutan dan lahan	Adanya Produk hukum dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup tentang upaya pencegahan dan pengurangan terjadinya degradasi hutan dan lahan	Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan				

4	Permasalahan Krisis	Adanya Produk hukum dari		
	Sumber Daya Air	Kementerian Negara Lingkungan Hidup tentang upaya penanggulangan masalah krisis sumber daya air	Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air	e ga Ngjar
5	Kerusakan Pesisir dan Laut	Adanya regulasi dari		
	dan baut	pusat tentang pantai dan laut lestari serta penetapan kawasan konservasi pesisir dan laut secara nasional	Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sehubungan Program Pantai dan Laut Lestari serta penetapan kawasan konservasi laut sawu	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yakni "Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata" ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Flores Timur, yaitu:

Makna visi tersebut adalah:

- Flores Timur sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- 2. Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/Kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk menigkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarkatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi shingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun Kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur Sejahtera.

Visi tersebut di atas dijabarkan dalam 5 misi sebagai berikut:

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembanguna Flores Timur lima tahun kedepan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada pada aspek Ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut Flores Timur sebagai tempat kehidupan petani nelayan terpelihara ekosistem dn potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yanglayak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan prinsip Good Gavernance dan Clean Government.

Dari penjabaran misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana menjabarkan Misi Ketiga sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana melalui pelestarian lingkungan hidup, berkurangnya masalah pengaduan lingkungan, peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan, peningkatan penanganan persampahan serta peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

35%	The state of the s	logial new Vision	Description in the last of the	
No-	Microsoft could	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Section 150	
	Wis se ser man an infrastrum	3 7 1		io interessi E
1.	I riogram Pengand-1	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		
	Lingkungan Hidup	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Terbatasnya jumlah SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan di	1.Adanya motivasi dari
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		bidang lingkungan b. Kuantitas dan kualitas SDM bidang lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup suntuk
3.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		masih kurang	meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan
	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	2.Anggaran (Dana)	c. Minimnya dana yang	Pelatihan. 2.Alokasi
	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam		mendukung pelaksanaan program/kegiatan	Anggaran untuk Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBD terus mengalami
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		d.Kurangnya sarana dan	peningkatan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		prasarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan kantor	3.Adanya manajemen yan cukup baik dalai memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara
	MSIZESSEIDELEIDEN KULDINGE	ing in the second		Optimal
	Program Pengelolan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Terbatasnya jumlah SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang lingkungan b. Kuantitas dan kualitas SDM bidang lingkungan masih kurang	a. Adanya motivasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup suntuk meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan
		2.Anggaran (Dana)	c. Minimnya dana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan	Pelatihan. b. Alokasi Anggaran untuk Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBD terus mengalami

	3. Sarana dan Prasarana	d.Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan kantor	manajemen yang
--	-------------------------	--	----------------

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan RI dan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT

Telaahan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Berdasarkan kewenangan dari peraturan dan tata perundang undangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Tujuan Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah:

"Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional."

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah:

- 1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- 2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- 3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Adapun Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015
 - a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
 - b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan

2019 adalah:

indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;

c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Pernyataan diatas memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan masingmasing.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Menengan Rensies Dinas (sprigunosis Hidup Provinspikara	Parm Children ve fiyayan Marakan an tidan	Stiples Ponghambati	Projection (Control of Control of
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	- Kurangnya frekwensi pemantauan dan minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat - Minimnya aturan dari instansi teknis yang mendukung dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait	- Minimnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD - Minimnya keikusertaan staf Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dalam pendidikan dan pelatihan - Kurangnya kesadaran & pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	- Adanya Laboratorium Lingkungan - Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - Dana APBD I untuk kegiatan GPBM - Program/Kegiatan BLHD
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keaneka- ragaman hayati dan ekosistem hutan	- Kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten terhadap Gerakan Rehabilitasi Lahan - Minimnya data tentang keaneka-ragaman hayati dan ekosistem hutan	- Minimnya alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD - Kurangnya kesadaran & pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Provinsi NTT - SDM Dinas Lingkungan Hidup - Adanya Laboratorium Lingkungan - Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

3	Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun	Belum tersedianya sarana pengujian kualitas udara Minimnya sarana prasarana pelayanan persampahan Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	- Kurang cukupnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD - Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha - Minimnya keikusertaan staf Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dalam pendidikan dan pelatihan	- Dana APBD I untuk kegiatan GPBM - Program/Kegiatan BLHD Provinsi NTT - SDM Dinas Lingkungan Hidup - Adanya Laboratorium Lingkungan - Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - Program/Kegiatan BLHD
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	- Belum terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	- Kurang cukupnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD	Provinsi NTT - SDM Dinas Lingkungan Hidup
		secara bijak akibat kurangnya sosialisasi dan faktor kebutuhan ekonomi masyarakat		- Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
		- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	- Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	- Program/Kegiatan BLHD Provinsi NTT

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Renear tota Ruma Wiley-Neografication English State	o (Cerintsalahan Pelayanan). Gerin	Penghamba	entorio
1	Banyaknya usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW Kabupaten Flores Timur dan ketidakpatuhan pembangunan fisik dengan dokumen kajian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	Dengan tidak mendapatkan rekomendasi kelayakan ruang maka usaha/kegiatan tersebut tidak bisa mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Dengan demikian usaha/kegiatan tersebut tidak membuat dokumen lingkungan sehingga usaha/kegiatan	Belum ada sanksi yang jelas terhadap usaha/kegiatan yang tidak sesuai tata ruang	- Perda RTRW harus dilengkapi dengan sanksi hukum untuk menghentikan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang - Harus segera diperdakan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Larantuka sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha/kegiatan
2.	Lokasi TPA	pengelolaan lingkungan Flores Timur merupakan Kabupaten Kepulauan sehingga membutuhkan TPA untuk setiap pulau/daratan	Masih mencari lokasi TPA yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah ada peruntukan lokasi TPA dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Flores Timur

3. Lokasi TPS	Perlu penambahan TPS baru di tiap kelurahan/desa	Kota (RDTRK) Larantuka dan	Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Larantuka dan Waiwerang dapat digunakan untuk membuai perencanaan.
---------------	--	----------------------------	---

2.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan gambaran tentang perbedaan antara kondisi terkini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

A. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strenghts)

(1) Dukungan Sumber Daya Manusia:

PNS: 33 orang dengan latar belakang pendidikan: SLTP (2 orang), SLTA / SMK (15 orang), Diploma III (- orang), S1 (15 orang) dan S2 (1 orang). Berdasarkan golongan: Golongan IV (4 orang), Golongan III (19 Orang), Golongan II (7 orang), Golongan I (1 orang).

(2) Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan Kantor):

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
	- Lander	1 Unit
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Gedung Laboratorium	1 Unit
3	Gedung Pengolah Sampah	1 Unit
4	Garasi Mobil	3 Unit
5	Kendaraan Roda Enam	2 Unit
6	Kendaraan Roda Empat	
7	Kendaraan Roda Dua	5 Unit
1/4	Kendaran Roda Tiga(Gerobak Sampah)	13 Unit
8	Peralatan Laboratorium	1 Paket
9		11 Buah
10	Meja Biro	35 Buah
11	Meja 1/2 Biro	3 Buah
12	Meja Komputer	6 Buah
13	Komputer	9 Buah
14	Laptop	11 Buah
5	Printer	

16	UPS	
17	Mesin Hitung	4 Buah
18	Kipas Angin	4 Buah
19	AC Panasonic	3 Buah
20	Pesawat Telepon	7 Unit
21	Tabung Kebakaran	1 Buah
22	White Board	1 Unit
23	Kursi Tamu (Sofa)	1 Buah
24	Kursi Kerja	1 Set
25	Kursi Rapat (Biasa)	58 Buah
26	Meja Timbang	13 Buah
27	Lemari Kaca	1 Buah
28	Lemari Arsip	1 Buah
29	Filling Kabinet	12 Buah
30	Kulkas	2 Buah
31	Dispenser	1 Buah
32	Galon Air	2 Buah
33	Jam Dinding	2 Buah
THE REAL PROPERTY.		4 Buah

- (3) Dukungan Finansial yaitu adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur.
- (4) Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung Perencanaan Pelayanan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (5) Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.

Kelemahan (Weaknesses):

- Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Lingkungan Hidup yang berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;
- (2) Pendanaan dan anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup
- (3) Belum optimalnya sosialisasi tentang lingkungan hidup dan kebersihan kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- (4) Belum optimalnya koordinasi dengan semua stokeholders terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan
- (5) Masih minimnya Perda di bidang lingkungan hidup serta pelayanan persampahan/kebersihan;

B. Analisisi Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- Isu Pemanasan Global, Perubahan Iklim dan Penipisan Lapisan Ozon merupakan isu global yang telah menjadi perhatian serius seluruh Negara di dunia.
- (2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan persampahan melalui pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Adanya Regulasi maupun Kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan persampahan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (4) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good environmental governance)
- (5) Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah.
- (6) Penerapan otonomi daerah.

Ancaman (Threats)

- (1) Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
- (2) Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan.
- (3) Minimnya Regulasi dan Kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (4) Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan.
- (5) Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan
- (6) Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup lima ke tahun ke depan, adalah :

- 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang lingkungan hidup;
- 2. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan (sustainable development);
- 3. Peningkatan kepedulian dan partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- 4. Peningkatan kualitas air, tanah dan udara;
- 5. Peningkatan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah B3 (Bahan Berbahaya
- 6. Peningkatan perlindungan dan konservasi kawasan lindung;
- 7. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 8. Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan SDA
- 9. Penegakan hukum lingkungan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

							_		_				_		1	多级	37.0130	200		No. of Street	
										Bencana.	Berkurangnya Resiko	Hidup serta	Tampung Lingkungan	Dukung dan Daya	Mempertahankan Daya		STORY OF THE PERSON NAMED IN	in our many		では かんしゅう かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	
														Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas		The second secon				
Jumlah Instansi Pengelolaan B3 dan	jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan konceryasi mata air	UKL-UPL dan SPPL)	Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkingan (AMDAL	Daillban bill Branban	Jumlah Dokumen Kajian	dipantau	Jumlah sumber air yang	Kualitas lingkungan	Lokasi Pemantauan	(PETI)	Pertambangan Tanpa Ijin	koordinasi Penertiban	Terlaksananya	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas	THE WASTERS TO SEE THE SEE THE SEE	Control of the second s		india in Sagain	高大の地域の土地を大きながり	
	6 titik mata air (30 ha)		154 jenis usaha/kegiatan		1 Dokumen		10 titik sumber air		19 Kecamatan				1 kali		79%	5	Printed of the South State of	2018	からない 大学 大学 ののない ないかん	の行うがおります。	
1 unit Instalasi limbah B3 cair	6 titik mata air (30 ha)		154 jenis usaha/kegiatan		1 Dokumen		10 titik sumber air		19 Kecamatan				1 kali		79%	新的大型公司公司的	と の できる は の できる は の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1000 p	は、はないのでは、大学のなどのである。		
	(30 ha)		usaha/kegiatan		1 Dokumen	12	10 ddk sumber air	an itili - hor of	19 Kecamatan				I Kali	1 1211	90.70	A COMPANY OF THE PERSON		lozar	一	meria Sasairan Pada	こうできるとう ないこうない
1 unit Instalasi limbah B3 padat	(30 ha)	6 HHk mata air	usaha/kegiatan	154 ionis	T DOURING!	1 Dokumen	To day sumper an		13 Vecalilaran	10 Vacamatan			- main	1 kali	0070	80%		2020	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	おからいとなるとなったというと
	(30 ha)	6 titik mata air	usaha/kegiatan	154 lenis		1 Dokumen		10 titik sumber air		19 Kecamatan				1 kali		80%		2022	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	ははない。	当人とはなるというない。

Terlaksananya pengembangan taman rekreasi	Terlaksanannya pemeliharaan RTH	Jumlah Dokumen program pengembangan RTH	Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Buku Status Lingkungan HjdupDaerah (Informasi Kincrja Pengelolaan Lindkungan Hjdun)	dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya edukasi	Terpantaunya kualitas	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	Meningkatnya jumlah usaha yang diawasi	Jumlah kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	Pengelolaan Limbah B3
1 paket	10 Paket	1 dokumen	1,66	1 Dokumen		600 orang	1 laporan		8 usaha	15 Kasus	1 dokumen	
3 paket	10 Paket		1,67	1 Dokumen		600 orang	1 laporan		10 usaha	15 Kasus	1 dokumen	
3 paket	12 Paket		1,68	1 Dokumen		600 orang	1 laporan	1 Peraturan Daerah	11 usaha	15 Kasus	1 dokumen	1 unit Instalasi limbah B3 cair
з ракет	14 Paket		1,69	1 Dokumen		600 orang	1 laporan		12 usaha	15 Kasus	1 dokumen	
o paker	16 Paket		1,69	1 Dokumen		600 orang	1 laporan		13 usana	15 Kasus	1 dokumen	limbah B3 padat

		2.													-						
		Terselamatkannya Ekosistem Laut																			
		Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Havati Laut																			
pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang	Terlaksananya	Prosentase sumber daya hayati dalam kondisi baik	· Sampah Harian	Terhadan Volume	Laporan Periodik	Jumlah dokumen	Sampah	- Pengadaan Gerobak	Sampah	- Pengadaan Truck	Jumlah TPA yang dikelola	Pembangunan TPS baru	persampanan	pengelolaan	masyarakat dalam	Jumlah kelompok	lokal	regulasi dan kebijakan	Terlaksananya sosialisasi	persampahan	Akses sarana
	1 lokasi/200 m ²	62,5				1 Dokumen		8 Unit		2 Unit	1 Unit TPA	13 IPS	1000			2 Kelompok			5 Kecamatan		58,28
	1 lokasi/200 m ²	77,08				1 Dokumen		8 Unit		2 Unit	2 Unit TPA	13 173	JOTEC 12			2 Kelompok			5 Kecamatan		74,17
	1 lokasi/200 m ²	91,67				1 Dokumen		8 Unit		2 Unit	2 Unit TPA	10110	13 TPS			2 Kelompok			5 Kecamatan		86,69
	1 lokasi/200 m ²	100				1 Dokumen	,	8 Unit		2 Unit	1 Unit I PA		13 TPS			2 Kelompok	241		5 Kecamatan		100
	1 lokasi/200 m²	100	100			1 Dokumen	1 Dollars	a Unit	0 11-11	2 Unit	TOMETER	1 Hait TDA	11 TPS			7 Velonibov	2 Valamak		5 Kecamatan		100

		in
	memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat	Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang
	pengelolaan keuangan	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bidang lingkungan hidup dan kehersihan	% pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya	% pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya
5 orang	95%	92%
5 orang	95%	92%
5 orang	95%	97%
5 orang	95%	93%6

5 orang

95%

BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Organisasi Perangkat Daerah menjabarkan dan melakanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Dokumen RPJMD. Strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanaagunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam spirit Desa

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

The state of the s	Misi II : Selamatkan I-6	ingkai Desa Membangun k rastruktur Flores Timur	Kota Menata
Tujuan	Sasaran	rastruktur Flores Timur	
Mempertahankan Daya	Meningkatnya Kualitas	Strategi	Arah Kebijakan
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Lingkungan Hidup	Mengurangi Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Mengendalikan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
Terselamatkannya	Misi IV : Selamatka	n Laut Flores Timur	
Ekosistem Laut	The state of the s	Peningkatan Kawasan	Mark 1 ii
	Sumber Daya Hayati Laut	Konservasi Laut dan Rehabilitasi Terumbu Karang	Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut.
Mauniudla 2: 1 1	Misi V: Refor	masi Birokrasi	
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.	Meningkatkan pengelolaan program, kegiatan serta keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam satuan anggaran	Melaksanakan disiplin jadwal implimentasi program, kegiatan dan disiplin anggaran serta optimalisasi sarana dan prasarana kerja
		Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di bidang lingkungan	Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM dibidang lingkungan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didasarkan pada perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Program pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah, maupun jangka panjang. Program-program pengelolaan lingkungan Hidup di Kabupaten Flores Timur dimaksud dapat dilihat pada tabel 6.1 pada lampiran :

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai sasaran RPJMD. Dinas Lingkungan Hidup sebagai kamitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

6	رم د	4	2	1	新15张		NO
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Kawasan Lindung	Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah TPS	jumlah TPA	2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		indlator in the second
11,4 km2	44.363,78 km2	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	54 TPS	1 TPA (Tidak Layak)	-3	Tahun 0	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
334,3 km2	63,5 km2	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	13 TPS	1 TPA	-4	2018	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100
334,3 km2	63,5 km2	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	13 TPS	0	-4	2019	
334,3 km2	63,5 km2	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	13 TPS	1 TPA	6-	2020	Target Capalan Setap Ta
334,3 km2	63,5 km2	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	13 TPS	0	777.	2021	Tahun I
334,3 km2	63,5 km2	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	13 TPS	1 TPA	8.2	2022	
1.671,5 km2	318,2 km2	5 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	119 TPS	3 ТРА	2.4.9		Rondus Kunerja pada aldır periode sa KEMD

50 sumber air 10 sumber air	10 sumber air	10 sumber air	10 sumber air	10 sumber air	50 sumber air	Jumlah sumber air yang dipantau	9.
6 titik mata (30 ha)	6 titik mata air 6 titik mata air 6 titik mata air (30 ha) (30 ha) 6 titik mata air (30 ha) (30 ha) (30 ha) (310 ha) (310 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	32 titik mata air (160 ha) 6 titik mata (30 ha)	Jumlah Titik/daerah mata air yang dikonservasi	80
154 jenis usaha/kegia	154 jenis 190 jenis usaha/kegiatan usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 Jenis usaha/kegiatan	54 jenis saha/kegiatan	150 jenis usaha/kegiatan	Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan	7.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur 2017 - 2022 Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan penjabaran dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Rencana Strategis ini selanjutnya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good environmental governance.

Larantuka, Desember 2017 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur,

Drs. PETRUS PEDO MARAN, MSi

Pembina Utama Muda NIP 19721030 199311 1 001

									kualitas pelayanan bagi masyarakai	praserana yang memadai demi meningkatkan	Mewojudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung	Tujuan 1 Sesaran 1	THE PARTY OF THE P	多的品	Typan	4
									,	kedistan serta pengelolaan keuangan	35 35	-	100 m		Salaran S	
1 08 01 01	1 08 01 01	1 03 01 01	1 08 01 01	1 08 01 01	1 08 01 01	1 08 01 01	1 08 01 01	1 8 01 01	1 08 01 01	1 08 01 01 01	2		10000		Koda	第二十二十
18 Rapid-rapet knordnasi dan konsubad ka hur deerah	17 Penyedean makeran dan minuman	15 Penyedaan bahan bacaan dan percaran percaran perundang- undangan	12 Penyedaan komponen instalad listrik dan penerangan kartar	11 Penyedaan barang cetakan dan penygandaan	10 Penyedaan Alak Tuña Kantor	08 Penyedaan jara keberahan karitr	07 Penyedaan jasa administrasi keuangan	06 Penyedaan Jasa pennehar aan dat peripan kendaraan dinas / operatoral	02 Penyedian Jaa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lisek	Psmyedaan jasa surat manyurat	Pelayanan Administrasi Perhantoran		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 % %	Proposed (etc.)	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Terselenggaranya koordinesi dan konsultasi ke luar deerah	Terasdianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Tersedanya bahan becaan Can pereturan perundang - uxdangan	Tersedanya komponen Instalasi Ilstik dan Penerangan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedlanya pelayanan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedanya pelayanan Jesa pemelharaan dan perjanan kendaraan dinas / operasional	Tapenuhinya kebuluhan tekspon, sir dan listik	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat	pekyanan administrasi perhantoran		30000		Section .	A CHARLY KINGS TUSTED
90%	1 95%	. n	90%	95%	95%	80%	95%	99	%S8	%09 %09	•	200	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	機能を	pada Tahun Ares Perancaraan	
12 Bulan	12 Butan	12 Buton	12 Bulan	12 Bulan	12 Butan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		13 Ruden	是一种	1	建業經濟	
175,000,000	25.500.000	2.500.000	23,000,000	25.000.000	39.100.000	3.750.000	45,000,000	20.000,000	43,000,000	5.750.000	À	1281059992	等に は まかい	Rp	36.8°	100 to 100 to
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	No.	12 Bulan	STATE OF THE STATE OF	throat .		The same
195.000.000	30,000,000	2300.000	28.500.000	30.000.000	42.000.000	4.500,000	48.500.000	22.500.000	48.500.000	6.900.000		3.424.899.900	-10 -3	/ Ke	10 00	100 Per 100 Pe
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		(20) st	o 12 Bulan	5. 3. 3. C. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.			AND SHAPE
215.000.000	32.000,000	3.000.000	35.000.000	35,000,000	45.500.000	5,500,000	50,000,000	25.000.000	56,000,000	7,300,000		3.883.499.688	3 2000 S. 1-610 S	11.00	020	Target Market and Control of the Con
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Marie .					YES	12 Bulan	2 0000	ALC: NO.		
250,000,000	37.000.000	4.500.000	40.000.000	38.000.000	52.000.000	7.000.000	52.500,000	27.500.000	8,000,000			4209.699.586	- California	11.	21	7 7 7 7 7 7 7
12 Bulan	12 Bươn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	i2 Bulan				M 12 Ruban	ed 12 Bulan		A STATE OF THE STA		A Description
300.000.000	4.000.000	5.000.000	45.000.000	40.000.000	52,000,000	0.004.000	55,000,000	30,000,00		60 000 000	10,000,000	4342989.984		701	2022	Service de
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Butan	14 buan					12 Bulan	984 12 Bulan	-	99 8	A SHEET	Kores San
1.135.000.000 Sekretarid	128,500,000 Selvetariat	17.800.000	171_500.000 Sexveiznar	152,000,000 Sevretariat	230.800.000 Sexretaria	20.100	23,000,000	122000		282.500.000	38.35			2 . 10 . E . E . C. U	Hejeta Parangled Deatah	is rads with per-
	Selvetaria	Sekretarlat	Somethia	Sekretariat	Seuratarian	THE MAN DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART	Con Contract of the Contract o			0.000 Sekretarias	38,350,000 Sekretarian	19.123.999.940 Sehretariet		80. Pr. 25.	Doerah Penang- gung-Jawah	100
Larantika, Bu kata Provins, Balil dan Jakarta	Larentala	Lamba	ENTREST	Laramata	ENGINE #1					Larantuka	M Larampus	lat Larantuka		9	SORTE S	Total Live

1000	4	1								
		2	1000 P	2			NI.	2	2 08	2
	01 0		2	3	8	8	8	8	8	8
	94	9	8	8	9	9	3	9	3	22
	- 48	8	- 13		8	E	8	B	B	
	8522	9697	YEZZ	0 8 9	B B B	9	8	N N	N 5 3 7	2 2 2 2
The state of the state of	Rupar-report Noundreasi dan Nomudteal ke dalam daerah	Penyedaan jara fanaga pendukung dan teknis parkantaran	hogan hobgates Sens de hysens konte	Perpataan Kenderan Dinasi Operasional	Pengadaan perlengkapan pedang kantar	Person print Services prints	00 01 100 People Santa	22 Fernáltarian Indobensia gidang Tumor	Prometherasin ruferbarkasia kendarasin dinaskipprasional	Petrolitarian indiciterials patrengiapan patrengiapan patrengiapan
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	Termolongg ar anga Nonvertingal dan Normologia Column daer ah	Transdateja feringa pendakung dan taknit penkantaran Nati PNS penkantaran Nati PNS	Tendanya Sansa dan Praumou Aparetir peng manarisi	Tradays landscom dea operationd (15 sepect netter)	paral lares contributes beginning	Auth lung seried skingers.	sporu siepro.	Transplay a process	Terphoney Lucional Sea I operation	parts Security Security
Charles May 1 charles	100	5		2				1 gedang	3	Ş
THE REAL PROPERTY.	12 States	12 ficials	3	4 hain seperts meter Hends CERTEL 4 his Supra X 128	1768	Zuntlongsam Jih lageg J hush prinse, 1 in Namera diplas, 3 in LPS dan camera Water prod	I in requirer 2 In horse bird 5 In horse bird 5 In horse bird 5 In horse bird 6 In horse bird 6 Organ bird 6	1 polony	23	898
	84 400 000	7 1980 0000 0000	MI IN THE	277,000,000	200 000 11	N. 000 000	G 300 100	A 100 000	500 000 000	15.000.000
The state of the s		12 fiction	3	3 th sepera me Norda Versa	1794	1 unt lompate. 2 unt lompate. 1 unt lompate. 1 hash printe 3 th UPS, 1 set konsistan Internet	is bush majo buga stempa bing il bush burni bunja i	1 pedang	33	S.
461	E1 000 000	1115 000 000	DATE TO	75,000,000	17,000,000	41,002,000	15,200,000	55,000,000	570,000,000	17,002,000
2 12 AND 12 C		8	5	1 had sepera moter Honds Supre X 128	i Park	1 unt hompuler, 1 unt lapter, 2 hash prime dan 2 hash GPS	15,200,000 2 bush copi larga menga biro 2 bush kursi kerja,	1 pedang	89	88 88
100000000000000000000000000000000000000	100.000	1200 000.000	HICKOR EST	200 200 200	11.500.000	200 000 00	š 000 000	65,000,000	550,000,000	20,000,000
-		12 Tables 71	2	8	1584	1 unit komputar, 2 bush printer, 2 laptop	9 000 000 20 hush kurali Dayah busa (badi 2 hush bangku panjang	1 geoing	SSN SSN	88
-	200,000,000		HE PARTAL		25 500.000	30.000.00	77,000,000	70,000,000	500.000.000	25.000,000
1	6,000 12 Bulan		1		8			1 pedurg	SES	93
	-		,					75,000,000	700.000.000	30,000,000
	200000000000000000000000000000000000000		Name .	3		5	5	Sex.	23	5
The Party of	12 Bales		3	Sarah Mari	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		B.	DOUDDLEE	198150	167,000.
21 367 500 000	Present My Merit			8				SAINTANA 000	7.960 SOI, 000 Sekratulas	107,000,000 Seleviates
The Party of the P	Distant.			- Section	-			Linealis	Lineralia	Lineda
100	The second							2	2	g

			Sertz Berkurzngnya Resiko Bencana	Mempertahankan Meringkatnya Daya Dikung dan Kuaitas Daya Tampung Ungkungan Ungkungan Hidup	Tujuan 2 Sasaran 1	Miei Kedua Selamekan infrastruktur													3 2	
88 01	98	28	67.T	1 2 2 S		1	8	9/5/5 9/56 9/50	2		8 -1		2		1 08 01 72	8	2	8	4	
15 17 Pangendalan Pencamaran Ak	16 03 Pemantauan Kualitas Lingkurpan	16 05 Koordinasi penertban keplatan Pertambangan Tanpa izin (PETI)	為其物		L		05 01 Pendidikan dan peletihan formal		05 Program Paningketun Kupualtus Sumber Daya Aparetur		06 01 Penyusunan laporan cepalan kiherja dan kihisar reelisasi kinarja SKPD	dan Kepangan	Carrie R.	Scottist Suppose	42	1	-	6	76	
Jumilah Sumber bir yang dipantau	Lokasi penertauan kualitasi Ingkungan	Teriaksananya keerdinadi m peneriban perambangan tanpa jin (PETI)		Programme Auto-Cultiful Lighter Programme Community Comm	Service and and		Junian Aparatar yang mengikuti Distat Lingkungan 25 orang		Meningkatnya Kemampuan dan pengelahuan Aperetar		Tersedacya laparan capaian kinerja SKPO		Haningarinya espain theria program dan tasangan SCPD		Torieksanznya rehabilitasi berzi cedung kartor	karbr	Terpeliharanya meubolair		S - S	(Magae)
50 telk sumber air	2 sumber eir	0		位员制度	· 12.5		5 orang			1	RKA LAKIP, Renja LPPD. LKPJ				3		\$105	7 Unit Laptop, 6 Unit Printer	5 Unit Acroputar.	
50 tick sumber air 10 tick sumber air	19 kecanatan	1 kali Koordnasi			おおり		5 Orang	130	Seaso S		RKA LAKIP. Renja, LPPO. LKPJ			94	1 gedung kantor		80%	unit Printer	8 unit kompus	- Lyrin
COOLOC.701	54.575,000	31,000,000	di seti Seti	HH.	ECHINE SE		150.000.000		130,390,560		3.00.00			36,000,000	4,000,000,000		3,000,000		25 500,000	100
10 EEK sumber ak	19 kecamatan	1 kall Koordhasi			A10 65 11		5 Crang	7.00	Rusics		Renja LPPD, LKPJ	382	10300 12	95%	0		20%	Printer	0 7 unit komputer, 7	No.
107.300.000	55.575,000	30,000,000		第二十六十四 二十二十二 二十二十二	1,012,921,750 T.10%		on one of	100000				000 025 81		38.350.000			3,500,000			.10
10 tilk sumber sir	19 kecamatan	N.M. ADOPANAS		2000年100日日日	Kalti			5 Orang		A orang		RKA LAKIP.		00 95%	laboratorium	and and)00 95%	unit Printer	7 40	-11
107.300.000	55.575.000	SUPPLIES			CS.TSTORT			150,000,000		150.000.000		19.337.500		35.737.500		100.000.000	4,000,000		7 30,000,000	
10 tolk sumber air	19 kecamatan				KOTT			5 Orang		Sorang	CKP1, RPJMO dan RENSTRA			95%		000	95%		10 unit Laptop.	
107.360.000 11	8		200000		ustolezat.			150,000,000		150.000.000		50.000.000		50.000.000			400			14
10 tisk sumber air	19 locarration		A Confinal		KILDE			5 Orang		gornog 5 orang	LKPJ, RPJMD dan RENSTRA	200 RIKA LAKIP,		2000			000000			
107.300.000	- 8		00000000		ONTO LEGAL			150.000.000		150,000,000	20.	55.000.000		95.50					app.	1
50 tilk aumber air	19 kecamatan		6 kal Koortrasi		Pieni	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		0 25 crang		25 orang		2.000		95.00.000 95%				7,500,000 95		*CO 000 000
536.500.000	11.000		150,000,000					750,000		750,000,000			A September 1					95%		-
Laboration		Ungkungan Ungkungan	Sold Kajan			No. of the last of	1	750,000,000 Sebretariat		00.000 Sekretariet		218.687.300 3000000	Chief	218.507.300	Cabo	4.100.000.000 Sekietanen		22.500.000 Sekustariat		196.100.000 Consessed
		10 886	19 Kec.			10000000000000000000000000000000000000	Despass. Java	Kupang.	1	The state of the s			ale Lerandia		Calvedoriat	19:30:0		ctaria		- manuar

	2																
¥ 1		1 08 01				8	8 8			1 08	1 08	F	2 8	- 8		- 8	
	が開発	16 18				5	5 2	5 07		01 16 13	16 06		01 16 13	01 15 19		01 16 20	
Kerjatan		Pengelolaan Laboratorium				100	Penhgkatan peran systä masyarakat dalam pengendalan lingkungan hidup	Penckallan Damoak		Kocrdinasi Penyusunan AMDAL	Pengeldaan 83 dan Limbah 83		13[Monitoring dan Evaluasi Pengekdaan Limbah	19 Prksyanan Tindak Lanjur Pengadisan Masyarakat akibat adanya dupaan pencamaran dan I pencamaran dan I		20 Pengawasan Pelaksanaan Kebjakan Bidang Lingkungan Hidup	Penyuduran Peraturan Daerah
(Bettore) can regulate (Bettore)	4	Juntan Alat - alat , bahan Kansa Leboratorium yang Gadakan	Tedaksananya Belanja batan kimia	Tedaksananya Kalbresi Peralatan dan Penesharaan alat	R midsiane	Tedagananya koordinasi	Tedagananya koordinasi pedalah kalpataru dan seladah adiwiyata	Arrian Dokumen Kajian		juniah usaha yang mensisi dobuman jin lingkungan (AMDAL UKL-UPL dan SPPL)	Arrigh Instalasi Pengelolean B3 dan Umbah B3.	Pengelolaan Limban B3	Jurish dokumen Moritoring dan Evaluad	Arriah kassusi layanan pengaduan yang dendakanjuri		Meningketnya Usaha yang diawasi	Jurniah Perde
Personation	•	20 Alat Laboratorium	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paces	0		150 jenis usaha/sepietan	0	The same of the sa	0	14 kasus (Tahun 2016)		0	
171	が一般の	20 Alar laboratorium	1 Paket	1 Paket	1 Pakst	1 paket	paret	1 Dokumen		usaha/kagistan			1 dokumen/ laporan	15 kasus		მ საგზа	
An		778.154.500		50.000.000	15,000,000	150.000.000	10000000	45.000.000		90000			100,000,000	75,000,000		80.525.750	
Print.	-9	laboratorium	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	ì	1 Dokumen		ushakepidan	Instaled Ambah B3 cair 1 unit		1 dokuman/ Japoran	15 kasus		10 usaha	
8	-10	778.154.500		60,000,000	15,000,000	150,000,000		45.000.000			400,000,000		45.000,000	75.000.000		82.350.750	
taigner	10°	laboraterium) ratel	1 Paket	1 paket	1 paket		1 Dokumen		usahakepiatan		Instalasi limbah	1 dokumen/l aporan	15 kadus		11 usaha	1 Peraturan Daerah
R3	Salah Walter	778.154.500		60,000,000	15.000.000	150.000.000		45.000.000			95	200,000,000	50.000.000	75.000.000		85.550.750	80.000.000
Dried .	20 AIX	laboratorium		1 raxes	1 Paket	1 paket		1 Dokumen		usaha/keglatan	E3 padat 1 unit		2 dokumen/ laporan	15 kasus		12 usaha	,
70 L		TT&154.500	500000	90,000	15.000.000	150.000.000		45,000,000	W W 33	Contractor of	400.000.000	7.7	65,000,000	75,000,000		90,735.850	
15	20 ALM	laboratorum	1 Palet		1 Paket	1 paket		1 Dokumen	154 lenie	usahakeglatan		Instalasi limbah	2 dokumen/ laporan	15 kasus		13 Usaha	
-30		778,154.500	60,000,000		15,000,000	Nontrod 1961		45,000,000	72,000,000			400.000.000	85,000,000	75,000,000	25	95.075.00	
31/	ושאלים אבו	1 Paket	1 Paket	DE LOS				1 dokumen	920 jenis	Usaha kegatan Dina	j		2 dokumen/ laporan	68 NASUS		54 usaha	1 Peraturan Decrah
-18		3,850,772,500	300,000,000	75 000 000	750,000.00			225.000.000	303.500.000	BOO DOOL DOOL Seksi		600,000,000 Seksi	323.000.000 Seksi Pangel Umbat	375.000.000	A15 033 450	435,053.434	80,000,000
GLen 61:	Laboratorium	Gien 6		THE RESIDENCE OF	750,000,000 Seksi PPKLDPL			225.000.000 Seksi Kajian Dampak		Lingkungan	Pengelolaan Umbah B 3	Fangelolaan	Seksi Pangelolaan Umbah 8 3	375.000.000 Sakai Fengacuan Gengkedan Sengkeda Lingkungan	ATE DEL 450 Seisl Penegakan		80,000,000 Secur reingener Hukum Ungkoragn
-	1 laboratorium	UPTD	UPTO		19 Kac		10 Keeping	19 Accuracy	19 Kocamatan	19 Kecamatan		13 VOC-man	19 Kecamaan	KAC.	besebar di 19	N.	

										4 9	STATE OF STREET
			The displays		- 3			1 08		2	2000
	(a)	08 01	11 05 01 17	08 01	08 1 19	水上(0×3)	15	8 01 20 07	Siden -	08 1 20	
odiadi ni	19113	17 01 Konservasi Sumber Days Air dan Pengendalan Kenasakan Sumber Sumber Air 17 02 Parital dan Lau Lestari	Program Producting an Academy year of Dayle Alam	02 Pengambangan Data dan Informes Lingkungan	01 Peringkatan Edukasi & Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Day Alam 8 Ungampan Hidap	Program Predinglation Russifies & Alassa Informatial Sumber	Pengujian Emisi Udara Akibat aktifitas Industri	Perspendalian Poksal	Program	September 1
	Properties (whethers)	nber Auriah mara air yang disensariasi disensariasi nber- Laur Luas daerah pama yang direhabitasi	Properties Count meta dat of ying Glomavical umber	Amiah dokumer, Siatus Lingkungan Hidup Deerah (Indomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup).	Aumiah enggota masyarakat yang die dukasi		Program Amilah Dokuman Finangsatan Idamaal Sumber Daya Idamaal Sumber Daya Idamaal Sumber Idangaal Sumber Idangaal Sumber Idangaal	Tepantaunya Kualitas Utara		Janiah laporan Status	State State of the
-	Heariti	32 titk mata air yang setah terkonservasi	1,42	म् १८	2.0	The state of the s	1 Dolumen			1000	S. 70 S. C.
a laborated to be	281	2 tok made of (10 ha) 1 lokasi (1 ha)		1 Dakumen	600 orang		1 Dokumen	1 Laporan		1 Laporan	7.
200 DAS 600	ostalia.	495.000.000 208.088.500	20.00 LOT 1. 16 63.10	55.000.000	135,000,000		190.000.000	15.000,000		16.000.000	1 h
	57	2 EK mata air (10 ha) 1 lokasi (1 ha)	26.71 - 1	1 Dokumen	600 orang		1 Dokuman	Laborari	122	1 Laporan	
228 875 350	OCTOOL WAS	971.124.650 228.875.350	1,200,000,000	400.000.000	135,000,000		640.000.00		000 000 00	8008	188
1 lokasi (1 ha)	16.8	2 this mata air (10 ha) 1 lokasi (1 ha)	W NAME OF		Sus Coo	15.12	Dokumen		1 Laporan	Legoran	THE COMP
	360,000,000	948.237.115 2	The second	55.000.000		136,000,000		200000000000000000000000000000000000000	30,000,000		2000000
1 lokasi (1 he)	j	2 tick mode air (10 ha) 1 lokasi (1 he)		Doubles		800 gran		1 Ochamon	1 Laporan		1 Laccian
	300.000,000	923.060.827 21 276.939.173 1		95,000,000		135,000,000		190,000,000	30 000 000		30.000,000
lokasi (1 ha)	26.28 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2 thic mata air (10 ha) 1 lokasi (1 ha)	The second second	Donner of the state of the stat		600 orang		3 Dokumen	1 Laporan		1 Leporan
276.939.173		923.060.827 10 276.939.173		220 000 000		135,000,000		190,000,000	30,000,000		30,000,000
5 lokasi	320	10 loked (60 ha)	a la	24	A Dokumen	3500 orang		Dokumen			Supporan
	0.014	4.260.483.419 S	103)M (1)	M - 114, PA - 1200	620,000,000	675,000,000		1,100,000,000	135.000.000	1000	- Janear
Seksi PPKLDPL		Seksi PPKLOPL			Kapatas Lingkungan Hidup	00 Sekul		8			Lateretarium
5 Kec.		5 Kec.			Larantika	3 Nac.			7 28		3

Tujuan 4	5 - 5 Y											
Sanaran 1	Terwijudnya Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian											
4	P 0	8	1 08 01	1 08 01	8	1 08 01		1 00 01	1 08 01	1 88 9	1 00	98
対象の機		24 04	24 05	24 06	3	24 07	2000	15 10	35	15 02	01 15 18	15 Q
The state of the s	Program Pangubban Ruwg Pantuda Hijau (NTM)	Penyusunan Program Pengembangan		Perreiharaan RTH	V. C. C.	Pengembangan Taman Rekreasi	2011	Scalabael Kobjakan Pengeldaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Manyarakal dalam Pengelakan Persampahan	Penyedaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengetdaan TPA	Pesingkatan operasi dan pereliharaan prasuran dan sarara pengeldaan persampahan
30 437 5 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Protectase permanunan genyadian ATH di kawasan perlotaan	Juniah Dokumen program pengembangan RTH	Terlaksananya penotaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksanannya	pemelharaan RTH	Terlaksananya pengembangan taman	Provident umonh	Terlaksananya sosialisasi regulasi dan keblakan lokal	Juriah kelompok masyarakat dalam pengebiaan persampahan	Pembangunan TPS baru	Jurriah TPA yang dikelola	i - Penpadaan Truck Sampah - Gerobak Sampah
		. 200					72.7 42.3 10.5 S	1	1	64 bush TPS	1 Bush TPA yang di desa Sinamalaka Kec Tanjung Bunga (Sedang dibangun)	-3 unit - 13 unit
A CONTRACTOR		1 Dokumen		10 Paket		1 Paket	部組 出 加限		2 Kelompok	13 TPS	1 Unit TPA	-2 prot 8 unit
318,604,000		115.004.000		100.000.000		200.000.000	2784.532.040	34,000,000	200.000.000	966.532,040	300.000.000	1,250,000,000
in:	200		2 Paket	10 Paket		3 Paket	11.1	5 Xecamazan	2 Kelonpok	13TPS	2 Unit TPA	-2 unit -8
950,000,000			400,000,000	100.000.000		150,000,000	1711.000.000	36.062.000	75.000.000	250,000,000	300,000,000	1,050,000,000
13.48			2 Paket	12 Paket		3 Paket	M.M.	5 Kecamatan	2 Kelompok	13TPS	2 UNITPA	- 2 unit
995,000,000			400,000,000	120.000.000	2000000	75,000.000	1218,197,500	36.197.500	80.000.000	150,000,000	300.000.000	650,000,000
1.10			2 Paket	14 Paket		3 Pakes	18 18 E	5 Kocamazan	2 Kelampak	13 TPS	1 UráTPA	- 2 บกใ - 8 เมส์
\$13.004.000			400.000.000	140.000.000	75,000,000	75,000,000	1,701,151,000	45,000,000	85.000.000	100,000,000	300,000,000	1.168.151.000
1.10	3.00		0 2 Paket	0 16 Paket	3 Paket	3 Paket	新	O O COL	2 Kelampak	11758	1 Unit TPA	-2 unit
00.0000.00	S. C. C. C.		400.000.000	140,000,000	75,000,000	/3.000.000	1.898.131.000		Stronton	211.000.000	350,000 000	597.151.000i -10 unit 401
0,10	1 Dokumen		O Pada	16 Paket	0 13 Teman	rekreasi	100 Jun	Control of the Control of the	ZABIOTO	63 TPS	1 Ună TPA	10 unit
Lincolne	高温油		1.002.000.000	600.000.000	575.000.000		UNS USC CUC		Source Control	1.707.532.040	350.000.000 Saksi Pengal sampa Umbah	\$115.302.000 S
	115.000.000 Seive	Penelharaan Lingkungan	Pernelharpan Lingkungan			THE OWNER OF THE OWNER.	O Setal	The second secon	Pengelolsan sampah dan Unibah B3	Seksi Pengeldaan sampah dan Limbah B3	olean h den 183	Seksi Pengekilaan sampah dan Limbah B3
	Katupalen			Kabupaten Florim	Kabupatan	Floor	Kar Kar	Larantika, Be Mandit, Lewcierna, Tig Bunga, Adonara Timer	Walverang	Larantuka dan Walwarang	Larantida	Larzmike dan Adonara

that downs tombe know

	Ternalamarkanny likeningkatny a Ekonistem Last Kalestarian Samber Daya Heyed Last	Tujuan 1	llal Keempet Se		· ·	Tujum
	y Heningkatnya ri Kalestarian ri Kalestarian Sumber Daya Hayad Laut	Securat 1	Misi Keempat Selamban Laut Flores Timur			Secre
-			Yes Time			100
8	, in the s			09	3	Kooe
01 23 01				15		1.11
	200			dan P		
laan dan asi Terumbu	Program Pembabbid das Rejabbid das Rejabbid das Elicitate Fedas das Leid			(8) 01 15 12 Nonicong, Eristuasi Jazzina dokuman Laporan (an Palaporan Periodic Bulanan Sampah	一名の数	Property de la Constantia de la Constant
lizak kawasan Isrumbu karang	Permetas sont inac Thinking Invasion wangs pout in feat than trads			Aumtah dokuman Laporan Perbodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah harian	4.	(Outro)
שלווטים				en Laporan nan Sampah ime Sampah	-	Balance, Kiranja Tujiaki, Balancak, Program (Outsine) Copi Kepintan (Outsine) Copi Kepintan
	(B)			80%	1. S. C. S.	Date Creation parts Total Avea Pere rearroan
1 Lokasi / 200 m²	1			1 Dokuman	"是"	SEE 2000 100
	230.1				图 经分子 8 年代	pris (S)
250.505.000 1 Lokasi / m²	250, 500, 100 77,08 - 12 -			35.000.000 1 D	题	-
m ³ 200				1 Dokumen	9	2019
600,000,000	800 000 000			40,000.000	-10	19
600.000.000 1 Lokael / 200 m²	ua J			1 Dokumen	15. 10. 图 2 2 3 15 3 15 2 2 2 3 12 3 12 3 12 3 12	4
	0 (00.000.000				12	Acces Pro
500.000.000 1 Lokad/ m ³	5. 5. 5. 5. 5. 5.			1000000		
m. 200				Daumen	C. 33.24 E	3
600.000.000 11.ckssl/	on muse			91000	(T.) (T.)	3
11.ckas/ 200 m²	un and an and an			Contract	10 mm	100
A. M.					F365	E MARK SECTO
600.000.000 5 Lakasi / 1000 m²				- Committee	100	200
2.650.505.000					State Williams	
2.650.506.000 Sakal PPXLDPL				Pengelolaan sampah dan Limbah B3	Sales Parket	para langu
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		+		48	1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S Ke				donera	Tarach ka da	